

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN NILAI-NILAI SPIRITUAL GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI UPAYA MENGHADAPI RADIKALISME DAN TERORISME

Sapta Baralaska Utama Siagian *
Dosen di Sekolah Tinggi Teologi Biblika Jakarta
Jerry Rumahlatu *
Dosen di Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta

Diterima: 15 Maret 2023; Disetujui: 27 Oktober 2023; Dipublikasikan: 31 Oktober 2023

Abstrak

Ketahanan nasional merupakan *national power* yang bulat, terpadu dan seimbang, dan merupakan gabungan dari kondisi dan konsepsi. Ketahanan nasional dapat diperkuat dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual, ketahanan nasional yang kuat akan mampu menghadapi berbagai ancaman yang ada. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual guna meningkatkan ketahanan nasional. Apabila ketahanan nasional kuat, maka paham radikalisme dan terorisme dapat dihentikan bahkan dapat dihapuskan dari bumi pertiwi. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan pendekatan paradigma participatory, Hasil penelitian ini membuktikan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual dapat meningkatkan ketahanan nasional yang berkontribusi positif dan efektif menghentikan paham radikalisme dan terorisme.

Kata kunci: Pancasila, Spiritual, Ketahanan Nasional, Radikalisme, Terorisme.

Abstract

National resilience is a unified, integrated and balanced national strength, and is a combination of conditions and concepts. National resilience can be strengthened by implementing Pancasila values and spiritual values, strong resilience will be able to face various existing threats. The aim of this research is to examine the importance of implementing Pancasila values and spiritual values to increase national resilience. If national resilience is strong, then radicalism and hatred can be stopped and even eradicated from our motherland. This research uses a qualitative descriptive methodology with a participatory paradigm approach. The results of this research prove that the application of Pancasila values and spiritual values can increase national resilience which contributes positively and effectively to stopping radicalism and terrorism.

Keywords: Pancasila, Spiritual, National Resilience, Radicalism, Terrorism.

How to Cite: Dr. Sapta Baralaska Utama Siagian, M.Th. Dr. Jerry Rumahlatu, M.Th.(2023). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nilai-Nilai Spiritual Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional Sebagai Upaya Menghadapi Radikalisme dan Terorisme, 8 (2): 60-73.

*Corresponding author:
E-mail: saptapouk@yahoo.co.id
jrumahlatu@gmail.com

ISSN 2355-1704 (Print)
ISSN 2746-8615 (Online)

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Para founding fathers yang dipimpin oleh Ir. Soekarno mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara, merupakan harapan yang sangat mulia, yakni menjadikan Indonesia sebagai negara utuh, yang mampu menjawab tantangan zaman. Lebih jauh, para pendiri bangsa menginginkan, Pancasila bisa mengakar pada ideologi masyarakat yang berbeda suku, budaya, bahasa dan agama serta menjadikan semua kelompok hidup harmonis dalam satu kesatuan.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa keragaman sebagai karakteristik bangsa ini, selain sebagai kekayaan, namun sering menimbulkan gesekan yang menghadirkan konflik berkepanjangan. Faktanya sampai hari ini, masih banyak daerah yang terpinggirkan, dan belum mendapatkan keadilan dalam hal pembangunan. Finansial lebih diutamakan sebagai aset, Keadaan demikian pada akhirnya memunculkan bibit pemikiran dan tindakan radikal sebagai bentuk perlawanan atas ketidakadilan yang didapatkan. Jadi, pemicu tindakan radikal seperti; frustrasi, ketidakadilan, terpinggirkan atau dipinggirkan.

Terorisme di Indonesia muncul di saat yang sama dengan dekade dimana bangsa ini melupakan Pancasila. Pancasila tidak benar-benar dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal para pendiri NKRI sejak awal menyatakan bahwa penyelamat, pemersatu, dan dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Bung Karno tegas berkata, “Bila bangsa Indonesia melupakan Pancasila, tidak melaksanakan dan mengamalkannya maka bangsa ini akan hancur berkeping-keping” juga dinyatakan bahwa barang siapa, atau kelompok manapun yang hendak menentang atau membelokkan Pancasila, niscaya akan binasa.

Dalam diskusi di Jakarta Sabtu 10 Agustus 2021 juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto mengatakan, “Anak-anak muda berumur 17-24 tahun itu menjadi target utama penyebaran paham ekstremis dan terorisme karena mereka masih muda, energik, mencari jati diri, dan masih memiliki semangat yang tinggi. selain itu mereka relatif belum memiliki tanggungan.” Dikatakan juga “Yang menjadi target adalah anak-anak muda umur 17-24 tahun. Dani Dwi Permana, itu umur 18 tahun. Dia anak Bogor dan meledakkan bom Marriott. Kemudian juga ada Umar yang meledakkan bom di Suriah, anak umur 19 tahun anak dari Banten¹.

Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto menyebut 85 pesen generasi milenial rentan terpapar radikalisme berdasarkan hasil survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)². Berdasarkan data BIN ada 900-1000 orang yang terpapar paham radikalisme dan terorisme. Dari jumlah tersebut memang tidak semua anak-anak muda milenial, ada yang berusia 24-45 dan ada yang 50 tahun yang hanya terlibat. Namun, yang menjadi garis terdepan adalah usia 17-24 tahun.

Data yang diakses Juni 2022 dari <https://news.detik.com> berita menulis bahwa, “Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri mengungkapkan telah menangkap 370 teroris sepanjang 2021. Data itu dihimpun dari Januari sampai dengan hari ini. 370 orang (jumlah teroris yang ditangkap) kata Kabag Banops Densus 88 Kombes Aswin Siregar kepada wartawan, Jumat 24/12/2021). Lebih lanjut dijelaskan penangkapan teroris tahun ini terbanyak dari kelompok Jamaah Islamiyah (JI). Penangkapan teroris tertinggi yakni bulan Maret dengan jumlah 75 orang.

¹www.voaindonesia.com akses Mei 2022.

²<https://www.cnnindonesia.com> diakses Mei 2022

Dari data tersebut, diketahui ada 900-1000 orang terpapar paham radikalisme, 85 persen dari jumlah tersebut adalah anak-anak milenial. Karena itu perlu langkah-langkah mencegah aksi radikalisme tumbuh subur di Bumi Pertiwi Indonesia, sebab hal itu menjadi ancaman serius bagi negara. Pemerintah harus melakukan pencegahan atau tindakan preventif agar masyarakat tidak mudah tergiur ideologi yang menggunakan atribut agama. Selanjutnya harus menjalin kerjasama yang erat antara pemerintah, aparat keamanan dan tokoh agama untuk meluruskan pemahaman agama kepada seluruh lapisan masyarakat, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu peran: keluarga merupakan benteng terdepan dalam mencegah munculnya radikalisme dan terorisme. Jika hal ini dilakukan dengan baik dan secara kontinu, akan membentuk kesepakatan di masyarakat untuk menolak paham radikalisme dan terorisme. Dengan demikian kelompok radikalisme dan terorisme tidak dapat berkembang di Indonesia.

Landasan Teori

1. Konsep Ketahanan Nasional

Menurut Sayidiman Suryohadiprojo, ketahanan nasional mengandung makna adanya kondisi dinamis suatu bangsa, berisikan keuletan dan ketangguhan yang membentuk kekuatan nasional yang mampu menghadapi dan mengatasi setiap macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, secara langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup berbangsa serta pencapaian tujuan nasional.³

Kondisi dinamis bangsa dalam ketahanan nasional meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa, baik yang bersifat alamiah maupun yang bersifat sosial. Aspek yang bersifat alamiah terdiri dari; aspek geografi, aspek penduduk dan aspek kekayaan alam. Sedangkan aspek yang bersifat sosial terdiri dari; aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial-budaya dan aspek pertahanan keamanan.

Ketahanan nasional meliputi kesejahteraan nasional dan keamanan nasional. Keduanya sama-sama penting dan tidak dapat dipisahkan. Pada situasi tertentu mungkin saja menitikberatkan pada kesejahteraan nasional, namun tidak berarti keamanan nasional dikesampingkan. Demikian sebaliknya, pada situasi tertentu akan menitikberatkan pada keamanan nasional, tetapi tidak berarti boleh mengabaikan kesejahteraan nasional. Suatu bangsa harus selalu memperhatikan ketahanan nasional yang meliputi kesejahteraan nasional maupun keamanan nasional. Negara harus mengusahakan keselarasan antara kesejahteraan nasional dengan keamanan nasional.

Ketahanan nasional yang dimaksud adalah kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. Sehingga ketenangan dan kedamaian dapat terpelihara dalam pembangunan nasional untuk masyarakat sejahtera dan untuk kemajuan bangsa.

³Jurnal Ketahanan Nasional, II (1), April 1997: 14

2. Nilai-nilai Pancasila dan Nilai-Nilai Spiritual

Nilai berasal dari bahasa Latin *vele're*, dalam bahasa Perancis Kuno *voloir* yang artinya berharga, berguna, berdaya, mampu, berlaku. Dari pengertian ini nilai dimaknai sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang berlaku, yang bermanfaat bagi sekelompok orang. Dengan demikian nilai dipandang sebagai kualitas seseorang atau kualitas sesuatu yang menjadikannya berguna, bermanfaat, disukai, diinginkan dan dapat membuat orang menghayati dan menghargainya.

Nilai dalam KBBI⁴ (2002:783) berarti, “Harga; sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan; sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.” Menurut Juhaya S. Pradja (2013:48) secara sederhana nilai merupakan ide atau konsep tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan seseorang yang menjadi perhatiannya. Sedangkan Sumantri (1993:3) mengatakan, “Nilai merupakan hal yang terkandung dalam hati nurani manusia yang lebih memberi dasar dan prinsip akhlak yang merupakan standar dari keindahan dan efisiensi atau keutuhan kata hati (potensi).”

Kastoff (2004:323) mengatakan, “Hakikat nilai terdiri dari tiga hal, yaitu; 1) Nilai sepenuhnya berhakikat subjektif tergantung pengalaman manusia pemberi nilai itu sendiri; 2) Nilai merupakan kenyataan-kenyataan ditinjau dari segi ontology, namun tidak dalam ruang dan waktu; 3) Nilai-nilai merupakan unsur objektif yang menyusun kenyataan.”

Dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan ide atau konsep yang berharga atau berguna bagi kemanusiaan, yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Nilai ini terkandung dalam hati nurani manusia yang menjadi dasar dan prinsip akhlak sebagai standar terindah dan efisien. Nilai sebagai dasar dan bentuk, sedangkan perbuatan sebagai isi. Nilai dapat dipahami dengan baik dan jelas juga dapat dinilai apabila isinya ada dan diikutsertakan bersama perbuatan.

Nilai-nilai Pancasila sangat dihargai, dihormati, dan diimplementasikan sebab nilai-nilai yang termuat dalam setiap sila Pancasila sangat berguna, sangat bermanfaat, dan sangat baik untuk dijadikan ideologi dan menjadi barometer moral bangsa Indonesia. Secara fundamental Pancasila sebagai kerangka yang kuat untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang multikultural. Keberagaman suku, ras, golongan, bahasa, dan agama selain menjadi potensi besar dan kekayaan bangsa, namun berpotensi menghadirkan konflik sosial dan konflik agama. Dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara, segala keberagaman yang ada dapat dipersatukan dalam harmonisasi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Adapun nilai-nilai Pancasila dalam lima sila yang harus dihayati, dimaknai dan diimplementasikan dalam kehidupan yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai yang mencerminkan bahwa bangsa Indonesia sebagai negara yang beragama. Artinya setiap warga negara Indonesia memeluk agama yang dipercayai. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini adalah: Mengamini adanya Tuhan Yang Maha Esa; toleransi, saling menghormati dan menghargai antarpemeluk agama; tidak memaksakan kehendak antarumat beragama; dan tidak menghina agama orang lain.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang mengajarkan bahwa setiap warga Indonesia harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang terlepas dari

⁴KBBI, 2002:783

perbedaan yang ada. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini adalah: Seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama dimata hukum, agama, masyarakat; tidak ada perbedaan sosial; mengutamakan sikap tenggang rasa dan saling tolong menolong; menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; saling menghargai.

3. Persatuan Indonesia. Nilai yang mengajarkan bahwa warga Indonesia harus sehat dan tidak boleh terpecah-pecah. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini adalah: Menggunakan bahasa persatuan; memperjuangkan dan mengharumkan nama bangsa; cinta tanah air; mengutamakan kesatuan dan persatuan; berjiwa patriotisme.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang mengajarkan bahwa negara harus mengutamakan rakyat. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini adalah: Pemimpin bangsa Indonesia harus bijaksana; mengutamakan kekeluargaan; kedaulatan bangsa berada di tangan rakyat; tidak memaksakan kehendak; keputusan bersama melalui musyawara.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang mengajarkan bahwa setiap warga negara Indonesia harus bersikap adil kepada semua orang tanpa membedakan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini adalah: Menerapkan perilaku adil dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik; menghormati hak dan kewajiban setiap orang; mencapai tujuan adil dan makmur; mendukung kemajuan dan pembangunan nasional.

Spiritual dalam bahasa Latin "*Spiritus*" artinya nafas (*breath*) dan kata kerja "*Spirare*" yang berarti bernafas.⁵ Dari arti kata tersebut hidup untuk bernafas dan untuk memiliki spirit. Memiliki nilai-nilai spiritual berarti memiliki ikatan yang dalam terhadap hal-hal kejiwaan atau kerohanian. Spiritual merupakan kebutuhan dasar manusia untuk berhubungan "kekuatan yang lebih besar di luar dari manusia Dialah Tuhan". Dan spiritual akan menghantarkan seseorang dalam pencerahan diri terhadap makna dan tujuan hidup yang berharga, yang bermartabat, dan yang berguna.

Sokolow dan Houston (2008:15) mengungkapkan delapan inti nilai dan prinsip spiritual, yaitu: 1) *Intention* (niat); 2) *Attention* (perhatian); 3) *Uniqe gift and talents* (kemampuan dan bakat unik); 4) *Gratitude* (syukur), 5) *Uniqe life lessons* (pelajaran hidup yang unik); 6) *Holistic persfective* (pandangan menyeluruh); 7) *Openness* (keterbukaan); dan 8) *Trust* (kepercayaan).

Nilai-nilai spiritual dalam diri setiap manusia memang dibangun dari kepercayaan dan agama yang mengedepankan dan mengutamakan kebersamaan, kedamaian, keamanan, kesejahteraan untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Spiritual bukan segalanya tentang agama, tetapi juga tentang hubungan secara roh dan jiwa dengan Tuhan, dan bagaimana manusia mengimplementasikannya secara universal dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

3. Radikalisme dan Terorisme

Dalam KBBI Online radikal diartikan, 1) Secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip); perubahan yang; 2) Politik amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan); 3) Maju dalam berpikir atau bertindak (<http://kbbi.web.id:radikal> akses Agustus 2021). Sedangkan radikalisme artinya; 1)

⁵Webster dalam Tamami, 2011:19.

Paham atau aliran yang radikal dalam politik; 2) Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastik; 3) Sikap ekstrem dalam aliran politik. (KBBI Online, <https://kbbi.web.id>radikalisme> akses Agustus 2021).

Reinhard Golose (2010:53) mengatakan radikalisasi merupakan proses penyebaran dan penyerapan pemikiran-pemikiran kelompok radikal, termasuk organisasi teroris. Proses radikalisasi ditandai dengan adanya penyebaran pemikiran radikal di masyarakat, sekaligus perekrutan anggota oleh kelompok radikal atau kelompok teroris. Sedangkan dalam Jurnal Intelijen dan Kontra Intelijen Vol III No. 17 Mei-Juni 2007, Muladi mengatakan radikalisme adalah paham atau aliran di bidang politik atau paham yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.

Tindakan radikalisme sosial keagamaan diartikan sebagai tindakan seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan atas dasar keyakinan agama. Dijelaskan pula sikap radikalisme sosial keagamaan merupakan kecenderungan untuk membenarkan, mendukung, atau mentoleransi paham atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan tersebut atas dasar klaim paham keagamaan. Teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan kepentingan politik. (<http://artikata.com/arti-354420-teroris.html>).

Terorisme menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan teror. Lindsay Clutterbuck dalam Gunaratna (2007) menerangkan bahwa, untuk menghadapi terorisme negara dapat menggunakan pendekatan keras (*hard approach*) dan pendekatan lunak (*soft approach*) secara simultan. Untuk pendekatan keras negara memiliki 3 instrumen yaitu militer, intelijen dan penegak hukum. Sedangkan pendekatan lunak di antaranya menggunakan cara pengembangan ekonomi, pendekatan sosial budaya, negosiasi politik, termasuk deradikalisasi, dan sebagainya. Cara terakhir ini dilakukan khususnya menghadapi terorisme yang dimotivasi oleh unsur keagamaan *religiously motivated terrorism*.

Menurut Daniel Bell dalam Toto Suryaningtyas (2008) ideologi bangsa bakal terhapus saat semua kekuatan (partai) politik mencapai konsensus umum yang mampu meminggirkan kepentingan dan ideologi partai. Konsensus itu dicapai karena ruang perbedaan sudah dipenuhi oleh kesejahteraan. Negara mampu menghapuskan kemiskinan, menjamin kebebasan, kemakmuran dan kesempatan bagi semua orang.

Dalam situasi semacam itu, ideologi tereduksi menjadi sekadar sebuah proses mencari cara terbaik menerapkan kebijakan. Bagaimana dengan Ideologi Pancasila yang mulai tergerus oleh perkembangan zaman semakin nyata? Apakah sudah terpenuhinya tingkat kesejahteraan masyarakat? Jika pertanyaan ini ditanyakan kepada masyarakat secara umum, sudah barang tentu sebagian besar akan memberikan jawaban yang ironis. Krisis multidimensi yang belum sepenuhnya pulih, membuat mayoritas masyarakat terkendala dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya. Bertolak belakang dengan asumsi negara sejahtera yang diungkapkan Bell, kondisi yang terjadi di era reformasi ini adalah sebuah kesalahan dalam memahami penafsiran ideologi tunggal Pancasila, yang dipahami secara manipulatif di era-era sebelumnya. Hal ini menyebabkan masyarakat pada berbagai lapisan, termasuk elit politik menumpahkan kekesalan atas penerapan ideologi Pancasila, yang berujung

pada sikap tidak peduli. Untuk itu, perlu suatu konsepsi guna meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila, terutama bagi para elit politik.

Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Irjen. Pol. Purn. Ansyad Mbai berkata strategi penanggulangan terhadap kelompok radikal adalah memperbesar jumlah kelompok moderat di Indonesia. Dengan upaya tersebut kelompok radikalisme akan sulit berkembang, bahkan masyarakat akan menyadari bahayanya kelompok radikal. Apabila kelompok moderat semakin berkembang dan kuat di negeri ini, dan masyarakat memahami bahayanya paham radikal, maka masyarakat akan ikut menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dari unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Penelitian ini menggunakan paradigma Participatory. Paradigma Participatory dipilih dengan tujuan untuk mendorong aksi transformatif, dan melibatkan masyarakat.

PEMBAHASAN DAN HASIL PEMBAHASAN

1. Menghentikan Paham Radikalisme dan Terorisme di Indonesia

a. Nilai-Nilai Pancasila dan Nilai-Nilai Spiritual Dapat Menghentikan Paham Radikalisme dan Terorisme

Hubungan antara radikalisme dan terorisme bahwa sesuai dengan sifat alamiahnya (*activist, fundamentalist, extreme, militant, fanatic, die-hard, way out*), gerakan radikal cenderung bersikap tegas, keras dan ada unsur pemaksaan (*coersive*). Penghormatan terhadap sistem nilai dilaksanakan dengan keras (*strictly*), harus sesuai dengan norma yang dianut, ada lembaga sanksi untuk melaksanakan penghukuman (*punishment*). Secara teoritik mengatakan, gerakan kelompok radikal akan selalu berhadapan dengan lingkungan sekitarnya yang berbeda dalam banyak hal, terutama di dalam penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku secara umum. Sangat besar kemungkinannya terjadi benturan, juga terjadi kerusakan, kehancuran, kehilangan, kematian bagi masing-masing pihak.

Semua pihak, apakah mayoritas (pemerintah) atau minoritas (teroris), pasti akan memperhitungkan ancaman (*imminent loss*) dan penyiapan kekuatan atau daya (*power*) untuk menghadapi ancaman. Logikanya, adalah pihak mayoritas yang memegang kendali situasi oleh karena pihak inilah yang memiliki daya yang lebih besar. (Robert, 2013).

Ada sistem nilai yang dipahami kelompok radikal dan diwujudkan dalam tindakan terorisme. Sistem nilai ini sebenarnya sangat tidak sesuai dengan akar budaya bangsa yang merupakan anugerah dari Yang Mahakuasa, namun sistem nilai tersebut kemudian dibenarkan oleh pelaku teror karena melihat kondisi yang dialami, selanjutnya mengajarkan sistem nilai tersebut. Sistem nilai kelompok radikal tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang menganut sistem nilai-nilai Pancasila dengan karakteristik bangsa yang majemuk, heterogen serta cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai yang tepat bagi bangsa Indonesia, mudah untuk dimengerti, memberikan interaksi positif bagi kehidupan bermasyarakat, saling menghargai, mempunyai nilai-nilai universal yang dikembangkan dari nilai-nilai luhur (nilai kebenaran dari Tuhan Yang Maha Esa) yang bersifat universal dan ada pada setiap agama, dan bukan nilai sepihak yang dapat memunculkan interpretasi yang berlainan sehingga begitu gampang untuk dibelokkan pemahamannya tentang landasan bangsa dan tentang kebangsaan.

Demikian juga dengan kelompok-kelompok radikal seperti ISIS, nilai-nilai kelompok tersebut tidak sejalan dengan pemahaman dan falsafah hidup bangsa, sehingga sebenarnya nilai-nilai kelompok radikal tersebut dapat dipatahkan dengan semangat kebangsaan yang didasari dan ditopang oleh nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual. Jadi nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual yang dimiliki bangsa Indonesia sangat penting dan besar manfaatnya dalam menghadapi paham radikalisme.

b. Pentingnya Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nilai-Nilai Spiritual di Masyarakat

Nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual yang telah tertanam dalam jiwa dan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia saat ini dapat dikatakan masih dalam koridor yang mendukung kehidupan kebangsaan. Memang ada penyimpangan yang terjadi, karena adanya oknum-oknum yang harusnya bertanggung jawab dalam penanaman nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual, namun nilai praksis yang harusnya dijelaskan secara benar diubah menjadi nilai-nilai praksis yang disesuaikan dengan paham kelompoknya.

Diharapkan penanaman nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual dapat terus berlangsung secara berkesinambungan sehingga nilai-nilai Pancasila yang berkembang dalam masyarakat dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seharusnya tidak ada lagi nilai lain yang berkembang untuk kepentingan kelompok, partai, golongan maupun kepentingan lainnya yang dapat memunculkan pemahaman dan interpretasi yang berbeda tentang nilai-nilai Pancasila, selain kepentingan untuk masyarakat dan bangsa Indonesia.

Bila nilai-nilai Pancasila diperkuat dan nilai-nilai spiritual dapat berkembang dengan baik, yang dimulai dalam keluarga, lingkungan serta situasi yang lebih besar, maka akan terlihat dalam masyarakat adanya saling menghargai sebagai sesama anak bangsa, toleransi, menaati prinsip-prinsip moral atau etika, juga saling menolong. Nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual yang berkembang semakin kuat dalam masyarakat, menjadi penyaring terhadap nilai-nilai lain yang bertentangan. Dengan demikian masyarakat tidak mudah terkontaminasi dengan paham radikalisme dan terorisme.

c. Peran Suprastruktur dan Infrastruktur Dalam Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nilai-Nilai Spiritual

Dalam menghadapi paham radikalisme dan terorisme di Indonesia maka peran suprastruktur dan infrastruktur sangat penting. Lembaga-lembaga negara walaupun saat ini belum ada lembaga negara yang secara khusus mengurus dan bertanggung jawab terhadap pengembangan Pancasila namun keseluruhan lembaga diharapkan berperan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat diwujudkan kedalam

program-program yang dimiliki maupun kegiatan diluar program. Alasannya! Bahwa semua lembaga negara sebagai suprastruktur harus dapat menjaga keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia. Jadi sudah merupakan tanggung jawab moral bagi seluruh lembaga negara untuk peduli akan penanaman nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual, karena nilai-nilai tersebut akan diimplementasikan oleh masyarakat kedalam kehidupannya sebagai suatu bangsa yang bersatu dalam wadah NKRI.

Demikian juga peran infrastruktur tidak kalah pentingnya karena infrastruktur juga bersentuhan langsung dengan masyarakat yang disebabkan kepentingan politiknya. Memang yang menjadi masalah adalah dalam upaya meningkatkan elektabilitasnya, maka yang sering terjadi yaitu para pelaku politik secara perorangan maupun partai dan unsur-unsurnya mengorbankan paham kebangsaan yaitu nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual yang diterima secara universal, lalu memasukkan doktrin-doktrin untuk kepentingan partainya. Bahayanya, jika terjadi penurunan implementasi nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual yang diterima secara universal di masyarakat, tentu saja masyarakat tidak dapat membandingkan doktrin-doktrin yang diajarkan padanya terlebih lagi dengan mendapatkan imbalan uang, makanan atau berbagai fasilitas, maka mereka akan memilih kelompok atau partai tersebut.

Diharapkan infrastruktur juga turut bertanggung jawab sebagai bagian dari anak bangsa yang turut berperan dalam keberlangsungan hidup bangsa dan negara yang ditopang dalam kehidupan masyarakat yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual saat berinteraksi dalam masyarakat. Infrastruktur politik, baik partai politik maupun LSM dan organisasi masyarakat lainnya harus berani bersikap tegas untuk melarang paham radikalisme dan terorisme berkembang di bumi Indonesia.

2. Kontribusi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nilai-Nilai Spiritual Guna Peningkatan Ketahanan Nasional

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan falsafah hidup bangsa Indonesia, merupakan ideologi pemersatu yang menjadi perekat kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila yang juga merupakan jati diri bangsa Indonesia, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi karakter utama bangsa antara lain menjunjung tinggi toleransi. Toleransi adalah pondasi demokrasi dan hasrat untuk menerima dan memperlakukan sesama manusia secara adil. Sikap toleransi sesuai Pancasila yang tertanam pada masyarakat Indonesia diyakini mampu menembus batas-batas primordialisme seperti agama, etnis, ras, dan golongan. Jati diri bangsa yang toleran juga menjadi prinsip dasar bagi membangun masyarakat Indonesia yang plural dan multikultur. Selain itu nilai-nilai humanisme Pancasila adalah humanisme yang mengandaikan berkembangnya peradaban Pancasila juga mengandung nilai-nilai nasionalisme. Nasionalisme Indonesia bukanlah nasionalisme sempit, namun nasionalisme Pancasila yang berakar pada kemanusiaan, yang saling menghargai dan menjunjung tinggi peradaban. Pancasila tidak hanya sesuai dengan multikulturalisme, tetapi sekaligus menjadi sumber energi dan landasan utama dalam upaya membangun masyarakat multikultur seperti Indonesia. Nilai Persatuan dalam Pancasila merupakan nilai kebangsaan yang maknanya semua untuk semua, satu untuk semua dan semua untuk satu. Melalui nilai kerakyatan/ kedaulatan rakyat, yang mengutamakan kemufakatan dan musyawarah berbagai perbedaan pendapat dan sikap diselesaikan

melalui upaya yang menjunjung kebijaksanaan. Nilai keadilan sosial dalam Pancasila mengandung jaminan bagi terwujudnya kemakmuran masyarakat secara menyeluruh dan merata⁶.

Penting pula menanamkan nilai-nilai spiritual yang diterima secara universal di negeri ini sebagai pondasi dalam kehidupan bersama di masyarakat. nilai-nilai itu adalah niat yang terpuji, perhatian, kemampuan dan bakat, syukur, pelajaran hidup, pandangan menyeluruh, keterbukaan, dan kepercayaan. Masyarakat yang memiliki nilai-nilai spiritual ini dalam dirinya akan mengimplementasikan saat berinteraksi dengan sesamanya dan hal ini akan mempengaruhi orang lain. Dengan demikian akan banyak individu-individu yang memiliki kualitas diri yang baik. Semakin banyak individu dengan kualitas yang baik, semakin kuat bangsa ini dalam ketahanan nasional. Yang berkontribusi positif pada bangsa yang utuh dan bersatu.

Ketahanan nasional memiliki beberapa aspek yang harus menjadi kekuatan bangsa dalam menopang keberlangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yaitu ketahanan dalam seluruh gatra baik gatra statis maupun dinamis yang harus dikelola secara tepat dan melekat dalam proses dan tujuan yang benar dalam pengelolaannya serta kemanfaatannya bagi bangsa Indonesia sehingga bila ini berjalan dalam rel yang benar akan menciptakan ketahanan nasional secara menyeluruh dan outcomenya adalah masyarakat yang adil dan makmur. Karena nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu aspek dalam ketahanan nasional, maka bila ketahanan ideologi Pancasila dan UUD NRI 1945 dapat terwujud dan dapat menghadang paham radikalisme dan terorisme, maka juga akan memberikan kontribusi terhadap ketahanan nasional bangsa Indonesia. (Modul BS, Lemhannas RI, 2016: 99).

Adapun strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual guna meningkatkan ketahanan nasional yaitu:

- 1) Optimalisasi pembangunan kesadaran masyarakat Indonesia tentang nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual melalui institusi atau lembaga negara.. Strategi ini bertujuan melakukan sosialisasi dan pembinaan dalam rangka mengimplementasi nilai-nilai Pancasila nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat.
- 2) Penguatan peraturan dan perundang-undangan serta optimalisasi program pembinaan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual. Strategi ini menekankan kewajiban pada seluruh organisasi di Indonesia (Orpol, Ormas, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan) untuk berasaskan Pancasila serta peningkatan program dan kegiatan-kegiatan politik, kebudayaan dan sosial yang bersinergi dengan para Tomas, Todat, Toma dan Toga untuk memberikan pendidikan nonformal kepada seluruh lapisan masyarakat yang berisikan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual.
- 3) Kurikulum pendidikan memuat nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual dalam pembelajaran. Berupa strategi penguatan materi manusia nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual di dalam kurikulum pendidikan pada semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan.
- 4) Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual bagi masyarakat. Berupa strategi pendekatan pada masyarakat khususnya masyarakat

⁶Lemhannas RI, 2016: 99.

miskin dan termajinalkan yang rentan terhadap pengaruh dan propaganda kaum radikal dan teroris.

3. Konsepsi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nilai-Nilai Spiritual Sebagai Upaya Menghadapi Radikalisme dan Terorisme

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat harus sampai pada tahap berakar dan membudaya dalam kehidupan bermasyarakat, sebab pasti akan memberikan kontribusi positif terhadap kondisi dan upaya masyarakat dalam menghadapi paham radikalisme dan terorisme. Masyarakat yang telah menghayati, memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan memiliki nilai-nilai spiritual dalam hidupnya tentu bersikap menolak paham radikal dan teroris.

Nilai-nilai Pancasila harus dipahami, dihayati, dan diamalkan secara obyektif maupun subyektif. Secara obyektif, Pancasila dipahami, dihayati, dan diamalkan dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan secara subyektif, Pancasila perlu dipahami, dihayati dan diamalkan oleh setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam kehidupan beragama.

Apabila Pancasila dan nilai-nilai spiritual agama telah dipahami dengan benar, tentu oknum yang terpapar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang salah, nilai mana yang tepat bagi masyarakat dan nilai mana yang tidak tepat. Selain itu dapat membandingkan nilai-nilai Pancasila dan spiritual keagamaan dengan nilai-nilai dalam paham radikal dan paham teroris. Menjadi jelas bahwa pemahaman akan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat secara menyeluruh, dapat dipastikan memberikan kontribusi untuk menghentikan paham radikalisme dan terorisme yang hendak mempengaruhi masyarakat. Bila kondisi ketahanan masyarakat yang demikian dapat berlangsung terus menerus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka dapat pula memberikan kontribusi terhadap ketahanan ketahanan nasional.

Upaya-upaya penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual dalam menghadapi radikalisme dan terorisme guna meningkatkan ketahanan nasional, dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain:

- 1) Optimalisasi pembangunan kesadaran masyarakat Indonesia tentang nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual yang berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain:
 - a) Pemerintah (Kemendagri, Kemenhan, Menkopolhukam, Lemhannas) meningkatkan dialog kebangsaan dengan Ormas, Orpol, Organisasi Keagamaan, Organisasi Pemuda sebagai media untuk memperkuat komitmen implementasi nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual.
 - b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pedoman pelaksanaan pendidikan Pancasila dan menanamkan nilai-nilai spiritual pada lembaga pendidikan formal dan nonformal pada semua jenjang, dan jalur pendidikan.
 - c) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengkoordinir kampanye dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual kepada seluruh lapisan masyarakat dengan cara memanfaatkan berbagai media komunikasi dan dikemas dalam bentuk yang lebih menarik sesuai dengan perkembangan zaman.

- d) Mengoptimalkan dan mendorong lembaga pemerintah yang ada seperti TNI, Polri, Lemhannas dan yang lainnya untuk melaksanakan program pembinaan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual yang universal kepada semua lapisan masyarakat luas dengan metode yang lebih kreatif dan inovatif yang mengikuti perkembangan zaman. Program cuci otak oleh para pelaku teror dalam proses sosialisasi dan rekrutmen yang mereka lakukan, jangan sampai jauh lebih efektif karena dikemas dengan metode *brain wash*, sedangkan metode-metode dalam pelaksanaan berbagai diklat penanaman nilai-nilai Pancasila masih lebih didominasi oleh proses-proses pembelajaran kelas yang lebih menekankan pada aspek kognitif saja.
- 2) Penguatan peraturan dan perundang-undangan serta optimalisasi kebijakan dan program pemerintah dalam rangka implementasi nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual. Adapun upaya yang dapat dilakukan antara lain:
 - a) Pemerintah bersama DPR-RI revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 untuk kembali mewajibkan Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, LSM, yayasan untuk berasaskan Pancasila.
 - b) Kementerian Dalam Negeri, (Kemendagri), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhan), Kejaksaan Agung, dan Polri, bekerja sama dengan Pemda, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan organisasi keagamaan, agar melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap berbagai organisasi agar dasarnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai spiritual dan ajaran agama.
 - c) Lembaga-lembaga keagamaan harus memasukkan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam pengajarannya.
 - d) Tomas, Todat, Toma dan Toga didukung pemerintah membuat dan meningkatkan program-program pendidikan nonformal pada masyarakat miskin tidak berpendidikan tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat..
- 3) Peningkatan dan penguatan kurikulum pendidikan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual universal pada lembaga pendidikan keagamaan. Adapun upaya yang dapat dilakukan antara lain
 - a) Kementerian Agama perlu melakukan evaluasi terhadap kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah yang menjadi binaan Kementerian Agama untuk memperkuat muatan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual.
 - b) Organisasi keagamaan membuat rumusan bersama materi pengajaran, pendidikan, ceramah yang bermuatan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual di sekolah-sekolah keagamaan.
 - c) Meningkatkan dialog antara pemerintah (Kemdagri dan Kemenag) dengan pihak penyelenggara pendidikan agama sebagai upaya meningkatkan kerukunan umat beragama, mewujudkan ketenteraman, dan ketertiban masyarakat agar tercipta harmonisasi sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
 - d) Tokoh agama dan organisasi keagamaan melakukan pembinaan dan bimbingan serta penyuluhan kepada umatnya agar lebih memahami ajaran agamanya secara benar (tidak sempit) dan mengamalkan ajaran agamanya dengan benar dan tidak bertentangan dengan nilai kebangsaan yaitu Pancasila.
- 4) Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual bagi

masyarakat miskin tidak berpendidikan dan termajinalkan. Adapun upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Pemerintah pusat, dalam hal ini, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan unsur lain yang terkait di setiap provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan dan desa mengoptimalkan program pelayanan masyarakat langsung di daerah-daerah miskin, daerah perbatasan, daerah tertinggal, desa, kawasan kumuh area di perkotaan berupa program meningkatkan kesejahteraan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi serta nilai-nilai spiritual yang akan memberikan makna dan tujuan hidup.
- b) Mengoptimalkan Program Bakti TNI di daerah miskin, daerah perbatasan, daerah tertinggal, kawasan kumuh di perkotaan, dengan pemantapan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual.
- c) Mengoptimalkan Program Bhabinkamtibas di daerah miskin, daerah perbatasan, daerah tertinggal, desa, kawasan kumuh di perkotaan, dengan pemantapan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual.
- d) Pemerintah daerah, Polri, TNI dan unsur lain yang terkait di setiap provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa mengoptimalkan koordinasi penanganan permasalahan yang dapat mengganggu harmonisasi sosial di daerah miskin yang rawan terpapar radikalisme dan teroris.

SIMPULAN

1. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terdapat dalam lima sila Pancasila. Pancasila sebagai barometer moral bangsa Indonesia, dan menjadi ideologi bangsa yang kuat untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang multikultural.
2. Nilai-Nilai spiritual yang harus diimplementasikan dalam masyarakat yaitu niat yang baik, perhatian, kemampuan dan bakat, syukur, pelajaran hidup pandangan menyeluruh, keterbukaan, dan kepercayaan.
3. Implementasi nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik itu suprastruktur, infrastruktur maupun substruktur. Dengan demikian terjadi peningkatan ketahanan nasional yang dapat mengatasi ancaman radikalisme dan terorisme serta ancaman lainnya.
4. Penguatan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai spiritual harus ada dalam kurikulum pendidikan formal dan nonformal agar pemerintah dapat melindungi generasi muda dari paham radikalisme dan terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Golose, Petrus Reinhard. 2010. *Deradikalisasi Terorisme "Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumpuk"*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Gunaratna, Rohan. 2007. Ideology in Terrorism and Counterterrorism, in Aldis, Anne, and Graeme P. Herd (eds), *The Ideological War on Terror*. Abingdon: Routledge.
- <https://www.cnnindonesia.com> diakses Mei 2022.

- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian> akses Mei 2022
<https://news.detik.com/berita> diakses Juni 2022
Kastoff, L.O. 2004. Pengantar Filsafat. Yogyakarta: Tiara Wacana. Li, D. 2014. Value Theory: a Research into Subjectivity. New York: Springer.
KBBI Online <http://kbbi.web.id/radikal> akses Agustus 2021.
KBBI Online, <https://kbbi.web.id/radikalisme> akses Agustus 2021.
Komputindo. Tamami. 2011. Psikologi Tasawuf. Bandung: Pustaka Setia.
Lemhannas RI, Modul BS. 2016. Pancasila dan UUD NRI 1945, Sub Bidang Pancasila dan Perkembangannya. Jakarta: Lemhannas RI.
Mangindaan, Robert. 2013. Terorisme dan gerakan Radikal di Era Globalisasi
Muladi. 2007. *Upaya Pencegahan Radikalisme Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional*. Keynote Speech pada acara Roundtable Discussion di Lemhanas-RI 16 Mei 2007. (Jurnal Intelijen dan Kontra Intelijen Vol III No. 17 Mei-Juni 2007. Jakarta: Centre for The Study of Intelligence and Counterintelligence.
Pradja, Juhaya S.. 2013. Pengantar Filsafat Nilai. Bandung: Pustaka Setia.
Sokolow, StephenL, Houston. 2008. The Spiritual Dimension of Leadership. California USA: Corwin Press.
Sumantri, Endang. 1993. Materi Pokok Pembinaan Generasi Muda. Jakarta: Universitas Terbuka.
Suryaningtyas, Toto. Pancasila, antara Desakralisasi dan Revitalisas
Suryohadiprojo, Sayidiman. 1997. Ketahanan Nasional Indonesia. Jurnal Ketahanan Nasional, II (1), April 1997.
www.voaindonesia.com akses Mei 2022.